

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Nugraha-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 dapat diselesaikan pada waktunya.

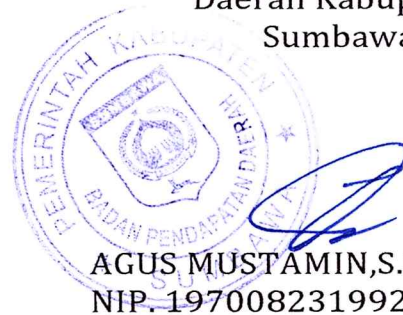
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2025 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun

Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Terima Kasih.

Sumbawa Besar, 2 Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten
Sumbawa



AGUS MUSTAMIN, S.Sos.M, Si
NIP. 19700823199211 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 merupakan rencana tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026 dan sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2021 - 2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjabarkan sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu dokumen Perencanaan yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah kabupaten Sumbawa Tahun 2025 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa beserta jajarannya. Oleh karena itu substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

B. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

Organisasi adalah suatu wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terkait dalam hubungan formil dalam rangkaian hirarkhi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor.2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
 - b) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Penagihan pajak daerah;
 - b) Sub Bidang pemeriksaan pajak daerah; dan
 - c) Kelompok jabatan Fungsional;
5. Bidang Perencanaan, pengembangan dan pelaporan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Perencanaan pendapatan daerah;
 - b) Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Pendapatan Daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Sumbawa untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan, menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai instansi yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan pendapatan.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA SUMBAWA GEMILANG YANG BERKEADABAN

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (Lima) Misi antara lain :

1. Sumbawa sehat dan Cerdas
2. Sumbawa Swejahtera dan Mandiri
3. Sumbawa bersih dan melayani
4. Sumbawa aman dan berbudaya
5. Sumbawa tangguh dan berkelanjutan

Misi 3 SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

Tujuan :

MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI

Sasaran :

1. Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2. Akuntabilitas Kinerja Bapenda

Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel di bawah.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban	Sumbawa Bersih dan Melayani	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah Akuntabilitas Kinerja Bapenda

Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah.
- b. Refocussing kebijakan ekonomi daerah untuk mendukung sector penyumbang PAD.
- c. Peningkatan kualitas layanan pajak dan retribusi.

- e. Optimalisasi System dan teknologi informasi .
- f. Pembaharuan database pajak secara real time .
- g. Penguatan sosialisasi secara luas dan kreatif.
- h. Penerapan Insentif dan sanksi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun.

Arah kebijakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam jangka waktu Tahun 2021-2026 yaitu :

- a. Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi.
- b. Koordinasi dengan stakeholder terkait.
- c. Pemetaan terhadap potensi pendapatan sesuai kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- d. Validasi data potensi penerimaan pendapatan asli daerah.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi.
- f. Kerja sam dengan lembaga sertifikasi terkait standar ISO. dan
- g. Bimbingan teknis kompetensi layanan perpajakan.

Rencana Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2024 telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja yang memuat program ataupun kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026. Adapun sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 .

Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah :

- a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan :

- 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- 3) Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
- 5) Pendataan dan Pendaftaran objek Pajak Daerah
- 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 8) Penetapan Wajib pajak daerah
- 9) Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
- 10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 11) Penagihan Pajak Daerah
- 12) Penyelesaian keberatan pajak daerah
- 13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 15) Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sasaran Strategis

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu sampai 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan antara lain:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Berdasarkan uraian diatas, maka Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa adalah sebagaiberikut:

**“MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DENGAN PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI”**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran

adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2. Akuntabilitas Kinerja Bapenda

Indikator Kinerja

Indikator kinerja sasaran utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Kategori Nilai SAKIP Bapenda

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
RKT Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	104.703.921.18 2
2	Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Nilai SAKIP Bapenda	80,39

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa 2025 dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGI	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat Hasil hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	A
2	Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	104.703.921.182,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.517.332.611,00	
1	Pertencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.474.500,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.760.658.886,00	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah	4.937.400,00	APBD
	Administrasi Pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	33.275.000,00	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.362.000,00	APBD
5	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	483.249.575,00	APBD
6	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	707.860.000,00	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.515.250,00	APBD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.673.578.400,00	
8	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.673.578.400,00	APBD

Sumbawa Besar, 2 Januari 2025
Kepala Badan Pendapatan daerah
Kabupaten Sumbawa

AGUS MUSTAMIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700826 199211 1 001



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten S u m b a w a untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten S u m b a w a Tahun 2025 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2025, dan besar harapan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah mampu memberikan kontribusi bagi keuangan daerah dalam rangka pembiayaan Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

**RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2025**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja								Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran					Penanggung Jawab
		uraian	satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi Per Triwulan				Rp.		APBD					
					Rencana Aksi Per Triwulan						Rencana Aksi Per Triwulan					
					I	II	III	IV			I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda	kategori predikat hasil evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai	A	A	A	A	A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.517.332.611	3.773.029.761	2.944.110.897	2.450.556.537	2.349.635.416	Sekretaris	
1		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	12	7	1	1	3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.474.500	36.869.500	21.640.000	39.323.000	11.642.000		
1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	2	-			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.986.900,00	9.986.900,00				JF Perencanaan	
2		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.929.500,00	6.929.500,00				JF Perencanaan	
3		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1				1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.699.000,00			5.699.000,00		JF Perencanaan	
4		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.533.100,00	8.533.100,00				JF Perencanaan	
5		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	3				1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.994.000,00			3.994.000,00		JF Perencanaan	
6		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	Laporan	3	3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.373.000,00		10.220.000,00	11.831.000,00	7.322.000,00	JF Perencanaan	
7		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3		1	1	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.959.000,00	11.420.000,00	11.420.000,00	17.799.000,00	4.320.000,00	JF Perencanaan	
2		Jumlah Kekuatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	16	2	5	2	5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.760.658.886	2.910.916.635	2.616.487.989	2.111.840.154	2.121.414.108		
8		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/Bln	55	55				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	9.724.109.886,00	2.887.761.635,00	2.612.667.989,00	2.111.840.154,00	2.111.840.108,00	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	
9		Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok	1		1			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.315.000,00	5.315.000,00				JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	
10		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dok	1		1			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.215.000,00	14.215.000,00				JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	
11		Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dok	1				1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.362.000,00				3.362.000,00	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	
12		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	2				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.974.000,00				3.974.000,00	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	
13		Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	dok	1		1			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.238.000,00				2.238.000,00	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	

14	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Laporan	8	2	2	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.275.000,00	3.275.000,00	-		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
15	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	dok	1				1	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.170.000,00	350.000,00	3.820.000,00		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
3	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok	3		1		2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.937.400	1.509.000	-	3.428.400	-
16	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	dok	1		1			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.428.400,00			3.428.400,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
17	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2				2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.509.000,00	1.509.000,00		-	Subbag Umum dan Kepegawalan
4	Jumlah Laporan Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Dok	12	3	3	3	3	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	33.275.000,00	13.835.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00
18	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	12	3	3	3	3	pelaporan pengelolaan retribusi daerah	33.275.000,00	13.835.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00
5	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Dok	7	1	3	1	2	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	5.362.000,00	5.362.000,00	-	-	-
19	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawalan	dok	7	1	3	1	2	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawalan	3.612.000,00	3.612.000,00			Subbag Umum dan Kepegawalan
20	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	dok	1				1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.750.000,00	1.750.000,00		-	Subbag Umum dan Kepegawalan
6	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok	74	14	15	20	25	Administrasi Umum Perangkat Daerah	483.249.575	313.153.300	89.833.600	74.132.675	6.130.000
21	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1			1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.498.875,00	2.750.000,00		2.748.875,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
22	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	2		2			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	241.089.700,00	222.639.700,00	18.450.000,00		-
23	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	32		8	8	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.351.000,00	17.961.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00
24	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	36		4	5	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.585.000,00	67.077.600,00	65.253.600,00	65.253.800,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
25	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dok	3			1	1	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.725.000,00	2.725.000			Subbag Umum dan Kepegawalan
7	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	53		5	10	12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	707.860.000	187.692.000	173.395.000	179.078.000	167.695.000
26	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	6				6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.828.000,00	8.095.000,00		5.733.000,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
27	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	4				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.140.000,00	18.535.000,00	18.535.000,00	18.535.000,00	18.535.000,00
28	Jumlah laporan penyediaan jasa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	35		5	10	10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.890.000,00	15.340.000,00	14.100.000,00	14.050.000,00	8.400.000,00
29	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	8				8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	568.002.000,00	145.722.000,00	140.760.000,00	140.760.000,00	140.760.000,00
8	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		47		4	6	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.515.250	303.692.326	36.274.308	36.274.308	36.274.308

30		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarnya pajak dan perizinannya	unit	30		4	6	5	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.515.250,00	39.692.326,00	36.274.308,00	36.274.308,00	36.274.308,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
31		Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	unit	1				1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	264.000.000,00	264.000.000,00				Subbag Umum dan Kepegawalan
B	MENINGKATNYA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUALAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp.	104.703.821.182	22.867.338.388	25.788.575.787	29.484.624.205	28.583.384.804		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.673.578.400	409.957.450	469.666.550	470.440.000	301.219.500	
9	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian Kinerja pendapatan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak Daerah	%	100	25	25	25	25		Program Pengelolaan pendapatan Daerah	446.814.050	81.827.000	79.291.050	143.991.500	141.704.500	Bid. Pendataan dan Penetapan Pajak daerah
		Jumlah dokumen pendapatan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak Daerah	Dok	28	-	2	-	26		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	446.814.050,00	81.827.000,00	79.291.050,00	143.991.500,00	141.704.500,00	Bid Pendataan dan Penetapan Pajak daerah
32		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	unit	5					5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	163.727.550,00	33.750.000,00	12.977.550,00	35.100.000,00	81.900.000,00	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
33		Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek	laporan	12					12	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	117.529.000,00	14.500.000,00	30.982.000,00	49.772.000,00	22.275.000,00	Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
34		Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	laporan	2		2				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	20.301.000,00	6.941.000,00	4.220.000,00	5.670.000,00	3.570.000,00	Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
35		Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	obyek pajak	241.353	60.338	60.338	60.338	60.338		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	43.030.500,00	10.776.000,00	12.857.500,00	13.409.500,00	5.987.500,00	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
36		Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	dok	9				9		Penetapan Wajib Pajak Daerah	102.226.000,00	15.960.000,00	18.254.000,00	40.040.000,00	27.972.000,00	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
	Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Realisasi Pajak daerah	Rp.	81.744.248.345	17.852.943.839	20.133.608.387	23.403.378.301	20.738.515.805		Program Pengelolaan pendapatan Daerah	353.980.800,00	127.438.800,00	93.698.000,00	105.594.000,00	27.250.000,00	Bid. Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan Penagihan PAD	Dok	156	5	134	7	10		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	353.980.800,00	127.438.800,00	93.698.000,00	105.594.000,00	27.250.000,00	Bid. Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
37		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	laporan	6		6				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	87.874.300,00	10.574.300,00	44.100.000,00	27.200.000,00	6.000.000,00	JF Analisis Kebijakan
38		Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	layanan	121		121				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	42.395.000,00	11.298.000,00	14.772.000,00	8.875.000,00	7.450.000,00	JF Analisis Kebijakan
39		Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	dok	2				2		Penagihan Pajak Daerah	121.925.500,00	68.643.500,00		53.282.000,00		Subbid Penagihan Pajak daerah
40		Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	dok	25	5	7	7	6		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	63.980.000,00	22.050.000,00	26.741.500,00	8.438.500,00	6.750.000,00	Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
41		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	dok	2				2		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	37.806.000,00	14.873.000,00	8.084.500,00	7.798.500,00	7.050.000,00	Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
	Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Capaian Kinerja pembinaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan transfer antar daerah	%	100	25	25	25	25		Program Pengelolaan pendapatan Daerah	672.783.550,00	200.691.650,00	296.677.500,00	220.854.500,00	132.265.000,00	Bid Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
		Jumlah dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan transfer antar daerah	Dok	23	7	8	4	4		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	672.783.550,00	200.691.650,00	296.677.500,00	220.854.500,00	132.265.000,00	Bid. Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
42		Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	dok	2	2					Perencanaan pengelolaan pajak daerah	35.305.650,00	7.075.650,00	8.180.000,00	11.200.000,00	8.850.000,00	Subbid Perencanaan Pendapatan daerah

43	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	dok	5	2	1	1	1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	693.153.500,00	185.834.500,00	178.849.500,00	205.054.500,00	123.415.000,00	JF Analis Kebijakan
44	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	dok	12	3	3	3	3	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	22.294.900,00					Subbid Evaluasi dan Pelaporan
45	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	4		4			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	16.981.500,00	7.781.500,00	4.600.000,00	4.600.000,00		JF Analis Kebijakan
46	jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	laporan	1					Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	105.048.000,00		105.048.000,00			JF Analis Kebijakan

